

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UMAK UNTUK  
MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTRIM KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata1**

**Oleh:**

**Scinta Novita Sari**

**NIM. 20102050089**

**Pembimbing**

**Dr. Muh.Ulil Absor. SHI.MA**

**NIP. 198010182009011012**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1759/Un.02/DD/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UMAK UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SCINTA NOVITA SARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050089  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA  
SIGNED

Valid ID: 6713706a1e4e9



Penguji I

Dr. Aryan Torrido, SE., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 6712499d1999



Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 66c8851183e17



Yogyakarta, 21 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 6715a33c72389



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Tell. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Scinta Novita Sari  
NIM : 20102050089  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Umak Untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Musi Banyuasin

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Jurusan/ gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat di munaqasyah kan. Atas Perhatian kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si  
NIP. 19830519200922002

Yogyakarta, 9 Agustus 2024  
Pembimbing

Dr. Muh. Ulil Absor. SHI. MA  
NIP. 198010182009011012

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Scinta Novita Sari  
NIM : 20102050089  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pelaksanaan Program Bantuan Umak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Scinta Novita Sari  
20102050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Scinta Novita Sari  
NIM : 20102050089  
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Scinta Novita Sari

NIM. 20102050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Ilmiah sederhana ini kupersembahkan terutama untuk kedua orang tua ku  
tercinta

Kemudian untuk Kakek dan Nenek, Serta Adikku tercinta yang selalu bertanya’

Kapan sidang dan wisuda?

Dan inilah alasan ku mengapa saya ingin menyelesaikan karya ilmiah ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**“Berakit – rakitlah dahulu bersenang – senang kemudian belajarlah  
bersungguh-sungguh kesuksesan akan datang .”**

**“ Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas  
kemampuannya.”**

**(QS. Al-baqarah: 286)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kesempatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Program Bantuan Umak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarga nya dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam di syafaatnya di yaumul qiyamah.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini untuk itu kepada seluruh pihak yang selama ini banyak membantu baik moril maupun materi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Ucapkan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
3. Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Dr. Muh. Ulil Absor., SHI., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Kedua orang tua penulis yaitu ayah Unil dan ibu Sophia yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis sehingga mampu mewujudkan impiannya
7. Keluargaku Kakek Sumardi, Nenek Parida, dan adikku Sabilah yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesainya skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu ada dalam suka dan duka
9. Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian, wawancara serta observasi, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terimakasih atas kerjasamanya, terimakasih untuk tidak menyerah

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin

Yogyakarta, 9 Agustus 2024  
Yang menyatakan,



Scinta Novita Sari  
Nim. 20102050089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kabupaten Termiskin nomor 3 di Provinsi Sumatera Selatan dengan katagori kemiskinan ekstrim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) padat tahun 2023 masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 14,90 % atau 103.625 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin yakni 695.472 jiwa. Kebijakan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengetaskan kemiskinan ektrim di wilayahnya yakni melalui Program Bantuan Umak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan Program Bantuan Umak dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Musi Banyuasin dan apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Program Bantuan Umak di Kabupaten Musi Banyuasin. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah empat orang. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Umak di Kabupaten Musi Banyuasin dimulai dari tahapan sosialisasi kepada masyarakat, pendataan penyaluran dan monitoring evaluasi Kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program Bantuan Umak masih terdapat masyarakat yang belum menerima Program Bantuan Umak, adanya pendamping Program Bantuan Umak yang menyalahgunakan wewenang, kurannya koordinasi antara pendamping Program Bantuan Umak dengan masyarakat penerima bantuan Umak dan masyarakat penerima bantuan Umak kesulitan dalam mengambil uang di ATM hal ini dikarenakan jarak antara rumah dengan ATM cukup jauh.

**Kata Kunci :** Program Bantuan Umak, Kemiskinan Ekstrim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERJILBAB.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	40
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM</b>	
<b>BANTUAN UMAK .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin.....	41
1. Letak Geografis Kabupaten Musi Banyuasin.....	41
2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Musi Banyuasin.....	43
B. Program Bantuan Umak.....	50

1. Pengertian Program Bantuan Umak .....	50
2. Presentase Jumlah Penerima Program Bantuan Umak.....	53
3. Tujuan Program Bantuan Umak .....	54
4. Kriteria Penerima Program Bantuan Umak.....	55

### **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UMAK DAN**

#### **KENDALA DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN**

#### **UMAK.....56**

A. Bentuk dan Pelaksanaan Program Bantuan Umak.....	56
B. Kendala Dalam Penyaluran Program Bantuan Umak.....	75

### **BAB V PENUTUP.....83**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA.....86**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN .....90**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....106**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan Penelitian.....	33
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin.....	42
Tabel 2.2	Jarak dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten.....	43
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	45
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Pada Tahun 2020.....	46
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Tahun.....	47
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang bekerja Pada Tahun 2020.....	47
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang dianut Pada Pada Tahun 2020.....	48
Tabel 2.8	Penerima Program Bantuan Umak.....	54

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Musi Banyuasin.....	41
Gambar 3.1	Interaksi Sosialisasi Program Bantuan Umak.....	62
Gambar 3.2	Interaksi Pengambilan Program Bantuan Umak.....	72
Gambar 3.3	Interaksi Evaluasi Program Bantuan Umak.....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Permasalahan kemiskinan umum terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang tak terkecuali di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah berkepanjangan.<sup>1</sup>

Salah satu tugas atau peran pemerintah adalah sebagai perumusan pada kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, maka diperlukan sebuah proses yang sistematis. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yakni; pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.<sup>2</sup> Meskipun terdapat banyak tahapan yang berbeda dalam proses perumusan kebijakan, proses ini akan dimulai dengan identifikasi masalah, perumusan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menerapkan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nano Prawoto, "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.9: 2009

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta: 2008), hlm.72

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 73

Lahirnya otonomi daerah menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peranannya dalam pembangunan perekonomian dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia mengeluarkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mencapai 0%. Pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan transformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin ekstrem. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di tetapkan pada tanggal 8 Juli 2022. Mengamanatkan kepada 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang diperlukan hal ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti melalui peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan Kerja serta pembinaan kelembagaan dan Sulbela Daya Manusia Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam mengatasi kemiskinan ekstrem pemerintah menjalankan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dengan fokus

---

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.190

pada Provinsi dan Kabupaten prioritas dimana masyarakat pada Provinsi dan Kabupaten tersebut dalam kategori masyarakat miskin.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan penduduk termiskin ketiga di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 masyarakat miskin di Kabupaten Muli Banyulasin sebanyak 14,90 % atau 103.625 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Muli Banyulasin yakni 695.472 jiwa.<sup>5</sup> Karena menarik untuk meneliti bantuan sosial pada wilayah kabupaten musibanyuasin.

Kemiskinan ekstrim merupakan masalah harus segera diatasi karena jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi masyarakat dampak tersebut diantaranya meningkatnya angka kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu seperti misalnya gizi buruk, stunting dan yang paling penting adalah banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Kondisi masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Musi Banyuasin mereka tinggal di rumah papan, untuk mandi dan buang hajat sebagian masih menggunakan air sungai, dan sebagian lagi memiliki kamar mandi tetapi tidak ada pembuangan air bekas mandi, dan untuk tempat membuang hajat mereka belum memiliki sanitasi yang layak.

Masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya menghadapi masalah kekurangan faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Kekurangan produksi ini membuat masyarakat miskin esktrim

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, <https://musibanyuasinKabupatenbps.go.id>, diakses, Sabtu, 6 Januari 2023



yang tinggal di perdesaan tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang sangat terbatas. Mereka juga tidak memiliki tanah garapan atau jika mereka memilikinya itu relatif kecil, sehingga mendorong mereka untuk bekerja di pertanian atau perkebunan atau sebagai pekerja kasar di luar pertanian atau perkebunan. Namun karena bekerja di pertanian dan perkebunan sifatnya musiman, pekerja mereka kurang terjamin. Akibatnya, tingkat upah mereka menjadi rendah di tengah penawaran tenaga kerja yang tinggi saat ini, yang membuat mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memiliki tanah garapan ataupun modal usaha sementara itu mereka juga tidak memiliki syarat jika ingin kredit perbankan. Pemmasalahan selanjutnya yakni tingkat pendidikan golongan miskin ekstrim umumnya rendah tidak sampai tamat sekolah dasar (SD).

Dalam hal penanganan penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Muli Banyuwangi termasuk dalam kategori Kabupaten prioritas yang menerima Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKEI). Dengan adanya Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Instruksi presiden tersebut dijadikan sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi dalam mengeltaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muli Banyuwangi. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Muli Banyuwangi adalah dengan melaksanakan Program Bantuan Umak.

Program Bantuan Umak merupakan inovasi baru yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muli Banyuwangi dalam hal menanggulangi kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Muli Banyuwangi. Program Bantuan Umak yang membantu

keluarga miskin ekstrim yang memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan. Program bantuan Ulmak ini diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Pemberian bantuan nasional menurut Bapennas masih banyak yang salah sasaran dan di salurkan ke mereka yang tidak berhak kesalahan sasaran ini membuat penyaluran ini diperkirakan merugikan negara. Permasalahan yang terjadi di Indonesia menurut Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Strnas PK) menemukan bahwa masih banyak bantuan sosial yang salah sasaran dan disalurkan pada masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan. Kesalahan sasaran penyaluran bantuan diperkirakan merugikan negara Rp. 523 miliar pada tiap bulannya.<sup>7</sup> Persoalan Program Bantuan Umak di Kabupaten Musi Banyuwangi patut dipertanyakan. Program bantuan menasar 16.406 jiwa dengan anggaran Rp. 70 miliar apakah dengan data jumlah penerima bantuan yang sangat banyak dan anggaran yang besar tersebut dalam penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan Program Bantuan Umak dalam mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Musi Banyuwangi dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Penelitian ini akan berguna untuk dalam

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuwangi <https://musibanyuwangkabupatenbps.go.id>, diakses, Sabtu, 6 Januari 2023

<sup>7</sup> Ressejo Aji Nugroho, Bansos Salah Sasaran Bikin Negara Boncos Rp 523 M Per Bulan (cnbcindonesia.com), 06 September 2023

mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengetaskan kemiskinan ekstrim sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Program pengetasan kemiskinan mendatang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan program bantuan umak yang dilakukan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Musi Banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Umak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelaksanaan dan Program Bantuan Umak
- b. Untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantara manfaat tersebut sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial utamanya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

### b. Secara praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi pihak-pihak terkait yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai implementasi Program Bantuan Umak dengan melihat pelaksanaan yang terjadi di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan agar masyarakat menjadi sejahtera.

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Dari hasil telaah pustaka yang telah penulis lakukan, karya tulis yang membahas permasalahan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Pada penelitian ini penulis

melakukan penelusuran terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji, diantaranya:

**Pertama,** Penelitian oleh Mohd. Kurniawan (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kelmiskinan di Kabupaten Mulsi Banyulasin (Studi di Kecamatan Sungai Lilin)”. Obyek penelitian ini membahas tentang faktor penyebab kelmiskinan di Kecamatan Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yakni masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin, sedangkan obyek penelitiannya adalah faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan Jeffrey Sachs

Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab kelmiskinan di Kecamatan Sungai Lilin yakni pendidikan yang rendah, jumlah anggota keluarga yang banyak dan pendapatan yang rendah.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas faktor penyebab kelmiskinan di Kabupaten Mulsi Banyulasin selantara penelitian yang dilakukan penulis meneliti tentang pelaksanaan Program Bantuan Ulmak di Kabupaten Mulsi Banyulasin., sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitian yakni sama-sama meneliti tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>8</sup>Mohd. Kurniawan, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi di Kecamatan Sungai Lilin)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri*, Vol.8: 2017



**Kedua**, Penelitian oleh Irsyah Hariyanda (2022) yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Waserda MKJ Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin”. Obyek penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dana desa dan strategi BUMDES Waserba MKJ dalam mengeluarkan kemiskinan di Kecamatan Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Subjek penelitian ini yakni dana desa dan BUMDES Waserba WKJ, sedangkan obyek penelitiannya adalah strategi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan teori pengentasan kemiskinan Muhammad Abdul Manan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa strategi BUMDES Waserba MKJ dalam mengeluarkan kemiskinan di Kecamatan Sungai Lilin adalah dengan cara mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDES.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Waserda MKJ dalam mengeluarkan kemiskinan di Kecamatan sungai Lilin selanjutnya penelitian yang dilakukan penulis untuk melaksanakan Program Bantuan Ulmak di Kabupaten Muli Banyuwangi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subjek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuwangi

---

<sup>9</sup>Irsyah Hariyanda, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Waserda MKJ Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin” *Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya*, 2022

**Ketiga**, Penelitian Dinda Pultri Nastiti (2022) yang berjudul “strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin . Obyek penelitian ini membahas peran BUMDES dalam pengembangan bisnis guna mengentaskan kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yakni BUMDES Rejo Mulyo, sedangkan obyek penelitiannya adalah pengentasan kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subjek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan teori pengentasan kemiskinan Niemierz

Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) BUMDES Rejo Mulyo memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis dan ekonominya; (2) Pemanfaatan dana BUMDES digunakan untuk operasional pengelolaan BUMDES, mulai dari pengelolaan Box Culvert sampai pengelolaan BRILink; (3) Pada strategi pengembangan BUMDES dalam pengentasan kemiskinan, BUMDES Rejo Mulyo berada di kuadran ketiga pada matriks analisis SWOT dan strategi yang digunakan adalah strategi W-O.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>10</sup> Dinda Putri Nastiti “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejo Mulyo dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin” Skripsi Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2022

(BUMDES) Rejo Mulyo Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. sementara penelitian yang dilakukan penulis meneliti tentang pelaksanaan Program Bantuan Umak di Kabupaten Musi Banyuasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subyek penelitian sama-sama tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Keempat**, Penelitian Azwardi (2014) yang berjudul “Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan” Obyek penelitian ini membahas efektifitas penyaluran Dana Desa Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini yakni Dinas sosial Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan obyek penelitiannya adalah alokasi dana desa dan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan teori pengentasan kemiskinan Arthur Lewis.

Hasil penelitian diperoleh penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% di tahun 2012.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa dalam mengentaskan

---

<sup>11</sup> Azwardi “Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2014

kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Musi Banyuwasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subyek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuwasin.

**Kelima,** Penelitian oleh Hedi Setiawan (2021) yang berjudul “Analisis Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Studi Kasus Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuwasin”. Obyek penelitian ini membahas tentang dampak bantuan langsung tunai bagi masyarakat di tengah wabah Covid-19 di Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuwasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini yakni masyarakat Desa Ulak Paceh, sedangkan obyek penelitiannya adalah dampak program bantuan langsung di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Thomas R Dye.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dampak bantuan langsung membantu masyarakat pada masa pandemi meskipun di dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik tetapi bantuan tersebut sangat berpengaruh bagi perekonomian rumah tangga.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas analisis Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuwasin. Selanjutnya

---

<sup>12</sup> Hedi Setiawan “Analisis Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Studi Kasus Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuwasin”. *Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021*

penelitian yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan Program Bantuan Ulmah di Kabupaten Musi Banyuwasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subyek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuwasin.

**Keenam**, Penelitian oleh Alya Gadis Ultami (2024) yang berjudul “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Musi Banyuwasin”. Objek penelitian ini membahas tentang implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Musi Banyuwasin dan dampak yang terjadi dari program rumah tidak layak huni (RTLH). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Subyek penelitian ini yakni Kepala BAZNAS Musi Banyuwasin, sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi program rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial Gillin.

Hasil penelitian diperoleh penerapan program rumah tidak layak huni melalui upaya pemberdayaan dapat membantu masyarakat miskin dalam kehidupan rumah layak huni dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena dana atau penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti untuk modal usaha dan peningkatan kualitas sandang dan pangan. Dampak positif dari implementasi program rumah tidak layak huni bagi penerima bantuan



yakni melngulrangi belban hidulp masyarakat miskin karelna melrelka tidak lagi memiliki tanggungan ulntulk melmbulat rulmah.<sup>13</sup>

Belrdasarkan pelnjellasan diatas pelnellitian ini belrbelda delngan pelnellitian pelnullis, pelnellitian ini melmbahas ImplelmeIntasi Program Rulmah Tidak Layak Hulni (RTLH) Dalam Melningkatkan Kelseljahtelraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mulsi Banyulasin. SelmeIntara pelnellitian yang dilakukan pelnullis melnelliti telntang pellaksanaan Program Bantuan Ulmak di Kabulpateln Mulsi Banyulasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subyek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ketujuh**, Pelnellitian oleh Abdika Jaya, (2023) yang belrjuldull “Collaborativel Govelrnancel Dalam Pelnanggullangan Kelmiskinan di Kabulpateln Mulsi Banyulasin. Pelnellitian ini melmbahas stratelgi pelmelrintah dalam melngelntaskan kelmiskinan di Kabulpateln Mulsi Banyulasin. Pelnellitian ini melnggulnakan metodel pelnellitian delskriptif kulalitatif dan pelndelkatan teloritis. Subyek penelitian ini yakni Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan obyek penelitiannya Collaborativel Govelrnancel Dalam Pelnanggullangan Kelmiskinan di Kabulpateln Mulsi Banyulasin. penelitian ini mengunakan teori kebijakan Arderson.

Hasil pelnellitian dipelrolelh collaborativel govelrnancel” dalam pelnanggullangan kelmiskinan di kabulpateln Mulsi Rawas tidak elfelktif dilihat dari “kondisi awal, delsign” institulsional, “kelpelmimpinan fasilitatif, dan prosels

---

<sup>13</sup>Alya Gadis Utami, *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Musi Banyuasin*. (Skripsi: Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2024)

kolaborasi” disebabkan belum adanya keselarasan standar dan perselsip mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggungjawab dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Muli Rawas (TKPKD) dalam penanggulangan kemiskinan merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dipandang perlu adanya penyamaan perselsip tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin validannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas “Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Muli Banyuwangi. pelaksanaan Program Bantuan Umat di Kabupaten Muli Banyuwangi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni subyek penelitian sama-sama tentang kemiskinan di Kabupaten Muli Banyuwangi

Dari beberapa pustaka yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang membahas tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muli Banyuwangi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi penelitian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Umat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muli Banyuwangi belum ada yang meneliti (novelty). Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan masih layak untuk diteliti.

---

<sup>14</sup> Andika Jaya, Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Muli Banyuwangi, *Jurnal Unmura, Universitas Muli Rawas*, 2023

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi resiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan.<sup>15</sup>

Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan seorang pekerja dapat mengenyam dan mengembangkan per kehidupannya sebagai manusia pada umumnya sebagai masyarakat dan anggota kehidupan, atau yang bisa disebut kesehatan pekerja.<sup>16</sup>

United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. UNICEF menyatakan bahwa terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan publik yang bersangkutan perlu bekerja sama dengan penyedia investasi. Strategi perlindungan sosial

---

<sup>15</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.15

<sup>16</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia: 2010), hlm,61

perlu dirangkai dalam sebuah kebijakan sosial ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Konsep perlindungan sosial ditujukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan kerentanan maka konsep perlindungan sosial mencakup dua dimensi jaminan sosial, yaitu jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontaal) dan pelaksanaan bertahap jaminan sosial dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal) kedua dimensi ini telah diamanahkan dalam konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 tentang standar minimum jaminan sosial.<sup>18</sup>

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003) perlindungan sosial secara tradisonal dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial. Perlindungan sosial didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.<sup>19</sup>

Kebijakan perlindungan sosial merupakan bagian dari serangkaian kebijakan pembangunan makroekonomi, program ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, yang dikembangkan untuk mengurangi resiko devrivasio serta mendorong pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya memungkinkan kelompok miskin aktif untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang

---

<sup>17</sup>Raditia Wahyu Supriyanto, *Perlindungan Sosial di Indonesia; Tantangan dan Arah Ke Depan* (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas: 2014), hlm.18

<sup>18</sup>Abdul Khaliq, “Kemiskinan Multidimensi dan Perlindungan Sosial”, *Jurnal Manajemen, Universitas Andalas*, 2017, hlm 6

<sup>19</sup> Barrientos dan Shepherd, *Chronic Poverty and Social Protection. CPRC conference on Chronic Poverty*, University of Manchester

lebih produktif tetapi juga memungkinkan kelompok miskin yang kurang aktif, untuk berkontribusi pada stabilitas sosial, yang pada gilirannya dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Melnulrult Asian Development Bank (ADB) kebijakan dan perlindungan sosial, khususnya dalam rangka negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima elemen, yakni:<sup>21</sup>

- a. Kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi hukum penawaran dan permintaan kerja yang efisien
- b. Bantuan sosial yakni program jaminan sosial belrulpa tulnjangan ulang, barang ataul jasa kelseljahtelraan ulmulmnya dibelrikan kelpada popullasi yang paling relntan yang tidak melmiliki pelnghasilan yang layak bagi kelmanulsiaan
- c. Asulransi sosial yaitul skelma jaminan sosial yang hanya dibelrikan kelpada pelselrta selsulai delngan kontribulsinya belrulpa iulran ataul tabulngan yang dibayar
- d. Jaring pelngaman sosial belrbasis masyarakat, pelrlindulngan sosial ini diarahkan ulntulk melngatasi kerentanan dalam tingkat komunitas
- e. Perlindungan anak, manfaat perlindungan sosial dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi masyarakat.

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan ", *Jurnal Sosial Humaniora*, Universitas Pasudan Bandung, 2015, hlm 2

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.18

Beberapa manfaat perlindungan sosial diantaranya:

- 1) Melindungi manusia dari berbagai resiko agar terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan
  - 2) Meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan dan keluar dari kemiskinan absolut
  - 3) Keluarga miskin memiliki standar hidup yang bermartabat
  - 4) Tercapainya dan terpeliharanya kesejahteraan sosial
2. Teori Pelaksanaan Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Sifat bantuan ini tidak terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>22</sup>

Bantuan yang diberikan melalui anggaran Negara (APBN/APBA) diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi kurang beruntung dan telah diuji kelayakan untuk menerimanya melalui tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara, seperti bencana alam, atau tetap, seperti cacat atau lanjut usia. Bantuan sosial diberikan melalui anggaran Negara (APBN/APBA) diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi kurang beruntung dan telah diuji

---

<sup>22</sup> Alfu Zukhrufu Firdausu, *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19*. Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia



kelayakan untuk menerimanya melalui tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara, seperti bencana alam, atau tetap, seperti cacat atau lanjut usia.<sup>23</sup>

Bantuan sosial terdiri dari empat jenis. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan kepada orang miskin yang diberikan melalui lembaga seperti panti asuhan atau KUBE. Kedua, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana tunai untuk biaya hidup. Ketiga, subsidi sementara untuk orang yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana alam. Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah, seperti subsidi BBM, dan bantuan untuk korban pengusuran.<sup>24</sup>

Menurut teori Georgia C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:<sup>25</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa saja yang akan mereka kerjakan. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan atau diberitahukan kepada pihak yang terlibat agar mereka mengetahui apa saja yang harus mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat serta konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten

---

<sup>23</sup> Amru Alba, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*, (Makassar : Unimal Press, 2019), hlm.36

<sup>24</sup> Ibid, hlm.36

<sup>25</sup> Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.90

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu:

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, hal ini terjadi karena komunikasi melewati banyak tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan. Tidak jelasnya pesan kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaannya. Ada situasi dimana para pelaksana harus fleksibel dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada situasi lain hal ini justru akan menyimpang dari tujuan kebijakan
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan

Komunikasi yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan bantuan sosial diantaranya:

- 1) Menginformasikan tujuan Program Bantuan Sosial
- 2) Menjelaskan syarat menjadi peserta Program Bantuan Sosial, kelengkapan data dan pembukaan rekening bank
- 3) Menjelaskan sanksi apabila peserta Program Bantuan Sosial tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program

- 4) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial
- 5) Menjelaskan hak dan kewajiban penerima Program Bantuan Sosial
- 6) Penjelasan tentang jadwal penyaluran Program Bantuan Sosial
- 7) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial
- 8) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila penerima Program Bantuan sosial tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
- 9) Menjelaskan tentang penyaluran Program Bantuan Sosial

b. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu program, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan baik. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen kebijakan, yaitu:

- 1) Staf, staf merupakan sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang tidak memadai, memadai atau tidak kompeten di bidangnya

- 2) Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yaitu informasi yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka diberi perintah untuk mengambil tindakan
- 3) Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang merupakan kewenangan atau legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan secara politik. Ketika kewenang tersebut nihil, maka kekuasaan para pelaksana di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat meninggalkan proses implementasi kebijakan
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa sarana pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial, sumber daya yang membantu pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial yakni:

- 1) Pemerintah Daerah
- 2) Kepala Desa
- 3) Perangkat Desa
- 4) Pendamping Program Bantuan Sosial
- 5) Ketua RW/ Ketua RW
- 6) BPD

## 7) Perwakilan masyarakat

### c. Disposisi

Apabila pelaksana kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya tahu apa saja yang harus dilakukan akan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi secara normal. Hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi yakni:

- 1) Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika personel yang tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang yang berdedikasi terhadap kebijakan yang telah ditentukan lebih khusus untuk kepentingan warga negara.
- 2) Melaksanakan penataan birokrasi (staffing the birokrasi) implementasi kebijakan harus dilihat dari segi penataan birokrasi. Hal ini mengacu pada pengangkatan pegawai dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dan kompetensinya.
- 3) Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, dapat menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang berulang-ulang dalam badan kesekretariatan yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan mereka yang menjalankan kebijakan.

Terdapat karakteristik struktur birokrasi yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik yakni:

- 1) SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan atau standar minimal yang dipersyaratkan oleh warga
- 2) Melakukan fragmentasi, untuk menyebarkan tanggung jawab atas berbagai kegiatan, kegiatan atau program di beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing

Menurut Ari Khusuma, langkah-langkah untuk membuat desain program dalam, yakni:<sup>26</sup>

##### a. Identifikasi Program (*Program Identification*)

Langkah pertama dalam mendesain suatu program adalah dengan mengidentifikasi program yang dikenal dengan istilah metode analisis situasi. metode ini

---

<sup>26</sup> Ari Khusuma, *Mengenal Desain Program Dalam Sebuah Organisasi*, (2019), hlm. 3



terdiri dari beberapa analisis yang memungkinkan untuk mengembangkan ide utama program. Sehingga dapat dibentuk kerangka skala prioritas bahkan untuk memecahkan jangka panjang. Analisis situasi digunakan untuk memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti memahami kondisi saat ini di lapangan, masalah yang perlu ditangani, penyebab dan konsekuensi dari masalah tersebut, siapa saja yang terlibat serta hal-hal yang memengaruhi masalah tersebut.

b. Formulasi Program (*Program Formulation*)

Langkah selanjutnya yakni formulasi program, langkah ini didasarkan pada pemahaman yang diperoleh dari analisis situasi. Formulasi program menggambarkan kerangka konsep yang jelas dan terorganisir yang mencakup tujuan, cara mencapainya sumber daya yang diperlukan dan waktu pelaksanaannya.

c. Perencanaan Kerja (*Implementation Planning*)

Dalam pembuatan desain program, rencana kerja mutlak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, dapat dipantau serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi jadwal pelaksanaan, mencatumkan sumber daya yang diperlukan, dan anggaran yang dikeluarkan. Rencana kerja biasanya disesuaikan sebelum jadwal pelaksanaan program dan selama pelaksanaan program.

d. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (*Planning of Monitoring and Evaluation*)

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah terakhir dalam pembuatan desain program pada suatu organisasi. Monitoring merupakan metode untuk membandingkan rencana awal dengan apa yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan program. Hal ini dibuktikan dengan melihat kemajuan pada setiap tingkat dari kerangka konsep berupa

perbandingan, pengukuran, verifikasi dan tindakan untuk program yang dilakukan. Sedangkan evaluasi merupakan tes untuk menilai penting atau tidaknya suatu program yang dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, dampak hingga keberlanjutan dan relevansi dari program yang dilaksanakan.

#### 1. Tinjauan Kemiskinan Ekstrim

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan berarti ketidakkampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.<sup>27</sup>

Menurut Mubyarto kemiskinan adalah situasi serba kekurangan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Jadi kemiskinan yaitu suatu kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.<sup>28</sup>

Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih sanitasi layak kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetap juga akses pelayanan sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, 2012

<sup>28</sup> Mubyarto, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), hlm. 196

<sup>29</sup> Kepmeko PMK Nomor. 32 Tahun 2022 Tentang ercepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan ekstrim memiliki empat bentuk sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Kemiskinan Absolut

Jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bekerja

b. Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin disebabkan oleh kekurangan akses ke kebijakan pembangunan ke seluruh masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan atau, dengan kata lain, orang tersebut telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya untuk membantunya.

c. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada masalah apakah seseorang atau kelompok masyarakat terpengaruh oleh faktor budaya seperti malas, pemboros, tidak kreatif, dan tidak mau meningkatkan kualitas hidup mereka meskipun ada bantuan dari pihak luar. Kemiskinan ini mengacu pada sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki keadaan hidupnya, meskipun ada usaha untuk memperbaiki tingkat hidup mereka, tetapi berasal dari pihak lain yang membantunya.

---

<sup>30</sup>Chriswardani Suryani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Universitas Diponegoro, Vol.08: 2005, hlm. 5

d. Kemiskinan Struktural

Kondisi miskin yang disebabkan oleh kurangnya akses ke sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi sering menyebabkan suburnya kemiskinan, biasanya disebabkan oleh kebijakan kelembagaan atau struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan,<sup>31</sup> diantaranya:

a. Rendahnya kualitas kerja

Rendahnya kualitas kerja menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, yang menjadi tolak ukur adalah tingkat pendidikan yang rendah seperti buta huruf.

b. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal

Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga menyebabkan kemiskinan

c. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi

Pada zaman modern seperti sekarang ini menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Semakin banyak pengangguran semakin banyak terjadi kemiskinan.

d. Penggunaam sumber daya yang efisien

Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadanng masih jarang memanfaatkan secara meksimal sumberdaya yang ada. Seperti misalnya: masyarakat perdesaan lebih memilih menggunakan kayu bakar ketika memasak dari pada

---

<sup>31</sup> Wle, *Pemerataan Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Sinar Harahap, 1981), hlm.85

menggunakan gas, sementara masyarakat perkotaan lebih banyak menggunakan gas dalam memasak.

e. Tingginya pertumbuhan penduduk

Tingginya pertumbuhan penduduk menjadi penyebab terjadinya kemiskinan hal ini dikarenakan manusia berkembang lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian yang akan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan

## F. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini penulis memerlukan metode penelitian yang jelas dan memaparkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>32</sup> Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan subjek utama.<sup>33</sup>

Penelitian studi kasus adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu tindakan tertentu, terlepas dari sifatnya pada individu, kelompok, lembaga atau organisasi. Model penelitian dengan menggunakan studi kasus

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung : Tarsoto, 1995), hlm 58

<sup>33</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018), hlm.8

dipilih karena perlu adanya batasan dalam sistem (bounded system) dalam kasus yang diangkat guna fokusnya penelitian pada aspek instrumental kualitatif. Hal ini merupakan ciri dari penelitian studi kasus.<sup>34</sup> Penelitian studi kasus dipilih peneliti karena sesuai dengan tema yang ada di penelitian yakni sosial.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yakni:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data berupa hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi di lokasi penelitian

### **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, buku dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Program Bantuan Umak yang mengambil lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

---

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Salemba Humaika, 2010), hlm.76



#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dan informan digunakan bersama. Informan merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti mengenai data yang akan digali lebih dalam oleh peneliti. Subjek penelitian adalah pihak atau individu yang diajukan pertanyaan untuk ditanyai dalam wawancara, diskusi atau sesi pertanyaan.<sup>35</sup>

##### a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dan informan digunakan bersama. Informan merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti mengenai data yang akan digali lebih dalam oleh peneliti. Subjek penelitian adalah pihak atau individu yang diajukan pertanyaan untuk ditanyai dalam wawancara, diskusi atau sesi pertanyaan.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan dua jenis informan kunci dan informan pendukung. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk memilih informan kunci dengan teknik sampling yang digunakan untuk memilih informan kunci dengan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tersebut diterapkan pada penentuan informan berdasarkan pertimbangan wewenang yang berkaitan kebijakan bantuan umak, hal ini selaras dengan definisi teknik purposive sampling memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan

---

<sup>35</sup> Ahmad Tohardi, Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), hlm. 491

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 491

dengan ciri-ciri dari karakteristik dari populasi yang akan diteliti.<sup>37</sup> Sedangkan, penentuan informan pendukung dengan teknik snowball sampling, informan dipilih berdasarkan saran atau rekomendasi informan kunci.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah orang yaitu dengan rincian 2 orang informan kunci dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 1 orang informan pendukung dari perwakilan pendamping Program Bantuan Umak dan 1 informan pendukung yaitu perwakilan masyarakat yang mendapatkan Program Bantuan Umak. Subjek penelitian dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama Inisial dan Usia Informan Penelitian	Keterangan
1	Ardiansyah, SE., MM (50 Tahun)	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin/ Pengguna Anggaran
2	Abrar Hibatullah Hisyam, S.Psi	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
3	Ibu Fitri	Perwakilan Pendamping Desa
4	Ibu Aten	Perwakilan Penerima Program Bantuan Umak

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.218

kemudian ditarik kesimpulan.<sup>38</sup> Adapun objek penelitian ini adalah “Bentuk Pelaksanaan program Bantuan Umak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin”. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2024 hingga bulan Februari 2024. Adapun Lokasi Penelitian yaitu di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan.<sup>39</sup> Tujuan dari wawancara yakni untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Bagaimana sosialisasi dan penentuan sumber daya dan prosedur pemberian Bantuan Umak.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dalam wawancara ini ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut diantaranya: (a) pewawancara, (b) responden, (c) topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, (d) situasi wawancara.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.39

<sup>39</sup>Feny Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.13

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.186

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Dalam interview bebas terpimpin (semi terstruktur) ini, peneliti bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini menunjukkan pada orang atau individu kelompok yang dijadikan unit atau sasaran atau sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 2) Pendamping Program Bantuan Ulmak
- 3) Kelluarga Pelnelrima Program Bantuan Umak

#### b. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan suatu aktivitas, individu, serta kejadian berdasarkan sudut pandang individu.<sup>42</sup> Metode observasi ini penulis gunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data, yakni untuk mengetahui, menyelidiki secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bantuan Umak Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat pengumpulan data peneliti melakukan observasi, peneliti mencoba untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peran dalam memperkuat hasil temuan dari penelitian, maka observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung masyarakat yang

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm, 238

<sup>42</sup> Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Harva Creative, 2023), hlm 109

menerima Program Bantuan Umak. Observasi juga dilakukan peneliti dengan peneliti menghadiri acara pertemuan pendampingan masyarakat penerima Program Bantuan Umak tujuan observasi untuk memperoleh pemahaman mengenai kelayakan penerima bantuan Umak.

Penelitian sebelumnya melakukan observasi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Pukul 10.00 WIB. Penelitian ini berada di Kantor Pemerintah Daerah Musi Banyuasin. Peneliti bertanya kepada pegawai Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang bertanggung jawab dengan penyaluran Program Bantuan Umak.

Observasi kedua dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pada pukul 08.00 WIB peneliti bertanya kepada ibu-ibu masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Program Bantuan Umak.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas kegiatan, maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.<sup>43</sup> Dokumentasi dilakukan guna kevalidan dan keabsahan data lapangan serta menjadi alat bukti akurat terkait keterangan dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi dokumentasi melalui pencatatan hal-hal yang terjadi di lapangan, recording, foto dan video mengenai penjelasan dan informasi yang didapatkan selain itu peneliti juga mencari dokumen atau arsip yang sudah tertera pada situs internet maupun catatan harian

---

<sup>43</sup> Feny Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm.14

informan. Dengan demikian metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencari sejarah dan tujuan Program Bantuan Umak serta sasaran penerima Program Bantuan Umak dokumentasi berupa foto pelaksanaan pemberian Bantuan Umak kemudian arsip daftar penerima Bantuan Umak.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis jawaban responden dan jika hasilnya tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Data yang di



peroleh dari pernyataan dari informan ardiyansyah, abrar, buk fitri, buk aten nya di tindaklanjuti dengan memasukkannya sebagai penjelasan sosialisai atau sumberdaya atau delagasi atau persedur pemberian Bantuan Umak.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.<sup>44</sup> Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Data-data yang sudah disajikan tersebut membantu

---

<sup>44</sup> Zainal Arifin, *penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2011), hlm 173

peneliti untuk menarik kesimpulan, agar dapat mengetahui kekurangan data yang mana mendorong peneliti untuk kembali ke lapangan data.

## **7. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan keabsahan data untuk menguji kebenaran atau keabsahan data (validitas) yang sesuai dengan jalannya proses penyusunan penelitian ini. setelah data terkumpul maka dilakukan pemeriksaan dan keabsahan data dengan setting dan teknik keterlibatan dan ketekunan penelitian dengan teknik triangulasi.

- a. Teknik keterlibatan dan ketekunan penelitian dengan setting, digunakan karena salah satu dari peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan penelitian
- b. Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian kali ini karena dalam pengumpulan dan analisis data membutuhkan sebuah prosedur untuk menguji keabsahan data. Selain itu untuk membandingkan data yang diperoleh sehingga akan menghasilkan data yang valid secara general serta untuk mencegah kemungkinan adanya unsur subjektivitas.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana penulis membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan dan kebenaran dari sumber atau informan yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. penulis mencari data dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan nantinya akan dilihat kebenaran melalui masyarakat penerima Program Bantuan Umak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab dibahas secara sistematis sebagai berikut:

*Pelrtama*, Pelndahullulan belrisikan hal-hal yang sifatnya melngatutr belntulk skripsi ini antara lain: latar bellakang masalah, rulmulsan masalah, tuljulan dan kelgulnaan, tellaah pulstaka, kelrangka telori, meltodel pelnellitian dan sistematika pelmbahasan.

*Keldula*, melmbahas selcara ulmulm telntang Gambaran Ulmulm Lokasi Pelnellitian bab ini belrisikan: Gambaran Ulmulm Kabulpateln Mulsi Banyulasin, Gambaran Ulmulm Program Bantulan Ulmak.

*Keltiga*, melmbahas Pellaksanaan Program Bantulan Ulmak UIntulk Melngeltaskan Kelmiskinan Di Kabulpateln Mulsi Banyulasin dan Hambatan Pelmelrintah Kabulpateln Mulsi Banyulasin dalam mellaksanakan Program Bantulan Ulmak

*Kelelmpat*, melrulpakan pelnultulp yang belrulpa bab telrakhir dalam pelmbahasan pelnellitian ini, yaitul untulk melnyimpullkan hasil pelnellitian selcara kelsellulrulhan, kelmuldian dilanjultkan delngan melngelmulkakan saran yang belrisi saran-saran ataul ulsull yang selsulai dan belrmanfaat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Bentuk dan Pelaksanaan Program Bantuan Umak**

Indikator pelaksanaan Program Bantuan Umak dimulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Program Bantuan Umak, proses penyaluran dan evaluasi.

- a. Komunikasi, dalam pelaksanaan Program Bantuan Umak komunikasi antar Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Program Bantuan Umak, Ketua, RT, Ketua RW, BPD dan masyarakat penerima Program Bantuan Umak berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan komunikasi pelaksanaan Program Bantuan Umak adalah melalui sosialisasi, serta pendataan dan penyaluran Program Bantuan Umak.
- b. Sumber daya  
Sumber daya, peran sumber daya sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Bantuan Umak. Sumber daya yang digunakan yakni sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penanggung jawab Program Bantuan Umak, kepala desa sebagai koordinator pelaksana di tingkat desa, perangkat desa sebagai penanggung jawab data, pendamping Program Bantuan Umak, ketua RT, Ketua RW sebagai pelaksana lapangan yang bertugas melaksanakan pendataan, validasi dan penertapan

masyarakat penerima Program Bantuan Umak. Selain sumber daya manusia (SDM) sumber daya berupa anggaran Program Bantuan Umak yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin

- c. Disposisi, pelaksanaan Program Bantuan Umak berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan, para petugas baik dari kepala desa, perangkat desa, pendamping Program Bantuan Umak, Ketua RT, Ketua RW dan BPD menjalankan tugasnya dengan baik, ramah kepada masyarakat serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
- d. Struktur birokrasi, pelaksanaan Program Bantuan Umak sudah sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program Bantuan Umak baik dari pusat hingga daerah. kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab di lapangan membawahi perangkat desa, pendamping Program Bantuan Umak, ketua RT dan ketua RW.

## **2. Kendala Program Bantuan Umak Pemerintah Daerah Musi Banyuasin**

Kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program Bantuan Umak masih terdapat masyarakat yang belum menerima Program Bantuan Umak, adanya pendamping Program Bantuan Umak yang menyalahgunakan wewenang, kurangnya koordinasi antara pendamping Program Bantuan Umak dengan masyarakat penerima bantuan Umak dan masyarakat penerima bantuan Umak kesulitan dalam mengambil uang di ATM hal ini dikarenakan jarak antara rumah dengan ATM cukup jauh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni:

1. Kepada Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan yang lebih merata untuk penerima Program Bantuan Umak sehingga bantuan dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat yang belum menerima bantuan
2. Kepada Pendamping Desa diharapkan selain bertugas mengadakan pendataan, penyaluran juga memberikan bimbingan kepada penerima Program Bantuan Umak sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Kepada masyarakat penerima Program Bantuan Umak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal *penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2011)
- Anggito Albi dan Setiawan, Johan *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Jejak, 2018)
- Azwardi “Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2014
- Alba, Amru, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*, (Makassar : Unimal Press, 2019)
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia: 2010)
- AG, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, *Statistik Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020*. <https://musibanyuasinkab.bps.go.id>, diakses Pada Tanggal 6 Januari 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, *Publikasi Tahunan Sektor Sosial dan Ekonomi*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2012)
- Bayo, Andry *Kemiskinan dan Strategi Memberantas Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2009), hlm.23
- Barrientos dan Shepherd, *Chronic Poverty and Social Protection. CPRC conference on Chronic Poverty*, University of Manchester
- Dinas Sosisl Kabupaten Musi Banyuasin <http://dinsos.mubakab.go.id/>, diakses, 14 Maret 2024
- Fiantika, Feny Rita *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Firdausu, Alfu Zukhrufu *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19. Intitut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia*
- Hariyanda, Irsyad “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Waserda MKJ Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Mekar Jadi

Kecamatan Sungai Lilin” *Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya*, 2022

Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Salemba Humaika, 2010)

Jaya, Andika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, *Jurnal Unmura, Universitas Musi Rawas*, 2023

Khomsan, Ali *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015)

Kurniawan, Mohd. “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi di Kecamatan Sungai Lilin)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri* , Vol.8: 2017

Khaliq, Abdul “Kemiskinan Multidimensi dan Perlindungan Sosial”, *Jurnal Manajemen, Universitas Andalas*, 2017

Khusuma, Ari *Mengenal Desain Program Dalam Sebuah Organisasi*, (2019)

Lestari, Putri Indah *Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sriwijaya: 2023)

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

Mubyarto, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1998)

Nasution, Abdul Fatah *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Harva Creative, 2023)

Nasution, Mustafa Edwin *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Nastiti, Dinda Putri “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejo Mulyo dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin” Skripsi *Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya*, 2022

Nurhafika, Siti “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Rokan Hilir”. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul* , Vol.2: 2022

Nugroho, Ressejo Aji, Bansos Salah Sasaran Bikin Negara Boncos Rp 523 M Per Bulan (cnbcindonesia.com), 06 September 2023

- Prawoto, Nano “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.9: 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga
- Rahayu, Sri Lestari Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepam (Bandung: Fokusmedia: 2012)
- Tohardi, Ahmad *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019)
- Setiawan, Hedi “Analisis Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Studi Kasus Desa Ulak Paceh Kabupaten Musi Banyuasin”. *Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021*
- Soemardjan, Selo *Menyusun Liku-liku Pendataan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 2003)
- Suharto, Edi *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta: 2008)
- Suharto, Edi *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharto, Edi “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan ”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Universitas Pasundan Bandung, 2015
- Supriyanto, Raditia Wahyu *Perlindungan Sosial di Indonesia; Tantangan dan Arah Ke Depan* (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas: 2014)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022)

Suryani, Chriswardani *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Universitas Diponegoro, Vol.08: 2005

Utami, Alya Gadis *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Musi Banyuasin*. (Skripsi: Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2024)

Wle, *Pemerataan Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Sinar Harahap, 1981)